

## Tata Kelola Pembiayaan Pendidikan Di Pesantren

Nuzula Indana Maulidah

[nuzulaindana29@gmail.com](mailto:nuzulaindana29@gmail.com)

Muh Syafaat Awalul Falah

[Syafaataawalulfalah@gmail.com](mailto:Syafaataawalulfalah@gmail.com)

### Abstrak

Dalam sebuah lembaga pendidikan memiliki tata kelola pembiayaan. Termasuk juga dalam lembaga pendidikan di pondok pesantren. Tujuan penulisan kajian ini yaitu untuk mengungkap tata kelola pembiayaan di pondok pesantren Salaf Modern berdasarkan filsafat empiris David Hume dan filsafat positif Auguste Comte. Lokasi kajian yaitu pondok pesantren Subulul Huda Banyuwangi Metode kajian adalah filsafat empiris. Maksud dari kajian ini yaitu kajian yang ditulis berdasarkan pengalaman penulis sebagai sumber dari pengetahuannya yaitu melalui pengamatan/observasi. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa tata Kelola pembiayaan Pendidikan di pesantren Subulul Huda telah sesuai dengan standar lembaga pendidikan, semua bentuk pengecekan dan pelaporan sudah menggunakan kwitansi sebagai bukti yang valid. Monitoring dan evaluasi pengelolaan anggaran dilaksanakan oleh sekretaris yayasan dan disetujui oleh pimpinan yayasan. Faktor pendukung pembiayaan di Pesantren ini yaitu banyaknya donatur yang secara sukarela menghibahkan sebagian hartanya seperti mobil, gedung dan lain sebagainya sedangkan faktor penghambatnya yaitu banyaknya santri yang kehilangan kwitansi pembayaran spp. Pengelolaan pembiayaan di lembaga pendidikan islam merupakan salah satu hal yang penting, salah satu manfaatnya yaitu meningkatnya efektivitas serta efisiensi pengelolaan keuangan. Jika pengelolaan pembiayaannya tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan permasalahan yang substansial.

**Kata Kunci :** Pembiayaan Pendidikan; Pondok Pesantren

### Abstract

An educational institution has financing management. This also includes educational institutions at Islamic boarding schools. The aim of writing this study is to reveal financing governance in Modern Salaf Islamic boarding schools based on the empirical philosophy of David Hume and the positive philosophy of Auguste Comte. The location of the study is the Subulul Huda Islamic boarding school Banyuwangi. The study method is empirical philosophy. The purpose of this study is that it is a study written based on the author's experience as a source of knowledge, namely through observations. The results of this study show that the governance of education financing at the Subulul Huda Islamic boarding school is in accordance with educational institution standards, all forms of checking and reporting use receipts as valid

evidence. Monitoring and evaluation of budget management is carried out by the foundation secretary and approved by the foundation leadership. The supporting factor for financing in this Islamic boarding school is the large number of donors who voluntarily donate some of their assets such as cars, buildings and so on, while the inhibiting factor is the large number of students who have lost their tuition fee payment receipts. Financing management in Islamic educational institutions is an important thing, one of the benefits is increasing the effectiveness and efficiency of financial management. If financing management is not managed well, it will cause substantial problems.

Keywords: Education Financing; Islamic boarding school

## **A. PENDAHULUAN**

Dalam sebuah lembaga pendidikan memiliki tata kelola pembiayaan. Termasuk juga dalam lembaga pendidikan di pondok pesantren pasti memiliki penataan kelola dalam pembiayaan, yang mana digunakan untuk melengkapi kebutuhan - kebutuhan dalam lembaga tersebut. Dalam dunia pendidikan tidak luput dari pembiayaan, maka dari itu untuk menciptakan lembaga pendidikan yang efektif harus memiliki tata kelola pembiayaan yang baik. Begitu juga sebaliknya tata kelola pembiayaan yang tidak baik maka akan merugikan lembaga pendidikan tersebut.

Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Tata kelola atau manajemen hampir dipastikan selalu ada dalam setiap organisasi baik perusahaan maupun lembaga pendidikan. Tanpa adanya manajemen atau pengelolaan yang baik dapat dipastikan bahwa tugas pokok dan fungsi antara seluruh stakeholder yang ada di sebuah organisasi akan kacau berantakan karena tidak terkelola dengan baik. Maka dari itu, pentingnya manajemen yaitu agar organisasi berjalan sesuai dengan harapan yang telah dituangkan ke dalam tujuan sehingga terbentuklah visi dan misi sehingga pada akhirnya akan menghasilkan kegiatan yang efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan UU No.20 Tahun 2003 pengertian pendidikan adalah suatu usaha sadar serta terencana untuk dapat mewujudkan suasana belajar & proses pembelajaran supaya peserta didik dengan secara aktif mengembangkan atau menggali potensi dirinya untuk bisa atau dapat mempunyai kekuatan pengendalian diri, spiritual keagamaan, kecerdasan, akhlak mulia,

kepribadian dan juga keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Manajemen pembiayaan pendidikan meliputi dua hal yaitu bagaimana memperoleh dana dan bagaimana menggunakan serta mengalokasikan dana dalam lingkungan serta tingkat pendidikan yang berbeda pula. Manajemen pembiayaan yang efektif dan efisien akan memberikan kontribusi yang penting pada kinerja manajemen yang maksimal. Penggunaan dana harus transparan serta dibukukan secara rinci dan jelas. Keadaan ini akan menumbuhkan kepercayaan dari para donator sehingga akan terus terdorong dalam dirinya untuk membantu pembiayaan pendidikan sehingga kualitas pendidikan akan terjamin salah satunya dengan pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien.

Dana pendidikan merupakan sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sedangkan pendanaan pendidikan merupakan penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah memberikan dana berupa hibah atau bantuan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Biaya pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dialokasikan dalam anggaran pemerintah.

Pesantren sebagai salah satu bentuk pendidikan islam tradisional karena pesantren merupakan lembaga yang menjunjung tinggi serta melestarikan tradisi, budaya, tatanan kehidupan islami dalam proses pendidikan kepada santrinya. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi hadir beberapa pesantren yang mengembangkan dirinya untuk menghadapi berbagai tantangan zaman salah satunya yaitu pondok pesantren modern. Namun dalam pertarungan tradisi modernisme saat ini, masih banyak juga pesantren yang bertahan dengan pesantren tradisionalnya.

Pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan yang menjunjung tinggi dan melestarikan tradisi, budayam dan tatanan kehidupan islami dalam proses pembelajaran kepada santrinya. Saat ini, pondok pesantren sudah banyak bertransformasi menjadi Pondok Pesantren Modern yang berupaya memadukan tradisionalitas dengan modernitas salah satunya yaitu sistem pembelajaran kitab kuning secara formal di dalam kelas. Ilmu agama dan ilmu umum sama-sama diajarkan namun lebih didominasi oleh ilmu agama. Manajemen atau administrasinya dikelola dengan tertib dan rapih, penekanan bahasa arab dan inggris dalam percakapan sehari-hari, serta lulusan pondok pesantren modern diberikan ijazah yang sama dengan sekolah umum yaitu ijazah negeri. Akan tetapi di Pondok Pesantren Darusaalam Blokagung menjadi pondok pesantren salaf modern yang mana memadukan antara pendidikan

kitab kuning dan pendidikan formal menjadi satu. Yang tetap mengedepankan kitab kuning tanpa mengesampingkan pendidikan kurikulum formal.

Segala bentuk pengeluaran di Pesantren Subumenggunakan kwitansi sebagai bukti yang valid, dengan adanya kwitansi tersebut tentu akan mempermudah pembukuan arus kas uang masuk dan keluar. Selain itu, dengan adanya kwitansi, akan mempermudah pihak bendahara ketika terjadi kelalaian dalam proses input data ke komputer. Penelitian yang relevan dengan artikel ini adalah penelitian oleh Nurhamzah (2019) dalam disertasi yang membahas tentang Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pesantren Berbasis Mutu: Penelitian di Pesantren Darut Tauhid Bandung dan Pesantren Modern Sahid Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber-sumber pembiayaan di kedua pesantren berasal dari pemerintah, orangtua, dan lembaga donatur. Dengan sumber-sumber tersebut, kedua pesantren sudah mempunyai kecukupan dana yang memadai untuk membiayai dan mewujudkan pendidikan yang bermutu, implementasi manajemen pembiayaan pendidikan berbasis mutu di kedua pesantren telah dilaksanakan secara efektif dan efisien serta konsisten, dalam hal: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, dan perbaikan pembiayaan pendidikan, faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi manajemen pembiayaan pendidikan berbasis mutu di kedua pesantren dikategorikan kepada dua hal, yaitu faktor internal dan eksternal, manajemen pembiayaan pendidikan berbasis mutu di kedua pesantren secara signifikan berdampak positif terhadap peningkatan output dan outcome pembiayaan pendidikan.

Selanjutnya Siti Saniyyah Sholihat (2017) dalam jurnal yang membahas tentang Pengelolaan Biaya Pendidikan, Partisipasi Masyarakat dan Mutu Layanan Pembelajaran Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Bandung tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) Perencanaan keuangan dengan indikator ketetapan dalam aloasi penerimaan dan pengeluaran merupakan indikator tertinggi, (b) Pengelolaan biaya pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap mutu layanan pembelajaran pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di kota Bandung, (c) Pengelolaan biaya pendidikan oleh kepala madrasah memfokuskan pada pemilihan program-program prioritas dalam mendukung peningkatan proses pembelajaran dan hasil belajar (akademi dan non akademik) yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa.

Yang terakhir, Nur Eka Setiowati (2015) Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan Terpadu Nurushiddiiq Cirebon. *AlAmwal; Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Temuan penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan di Lembaga Pendidikan Terpadu dan Pondok Pesantren Nuurusshiddiiq Cirebon sudah memenuhi standar lembaga pendidikan. Hanya 19 saja karena

tidak ada patokan baku yang berlaku secara umum pada lembaga pesantren, standar kecukupan atau ketidakcukupan khusus pesantren tidak dapat diketahui. Apalagi secara riil sistem pendidikan dan siklus kehidupan di pesantren berbeda dengan lembaga formal lainnya.

Berdasarkan novelty diatas mempunyai persamaan dan perbedaan, adapun persamaannya yaitu, dalam tema sama-sama membahas tentang manajemen pembiayaan pendidikan. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti mengkaji tentang tata kelola pembiayaan pendidikan. Sehingga perbedaan tersebut menjadi keterbaruan dalam penelitian ini. Oleh karena itu tujuan dalam penelitian ini ingin mengkaji tentang tata kelola pembiayaan pendidikan di pesantren.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode kajian yang digunakan pada penelitian ini adalah filsafat empiris dan positif yang didukung oleh data yang akurat berbasis pada teori yang relevan serta dikaji secara kritis disertai dengan analisis literatur yang primer atau berbasis pada kajian terdahulu dengan tema yang relevan. Yang mana rujukan diambil.

Alasan penulis memilih lokasi di Pondok Pesantren Subulul Huda yaitu pesantren ini merupakan tempat penulis bersekolah selama 6 tahun sehingga penulis mengetahui hal-hal yang terjadi di dalamnya, mulai dari pelaksanaan sampai dengan faktor penghambat dan faktor penunjangnya. Kemudian pihak pondok pesantren khususnya bersedia untuk diteliti sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan observasi sampai dengan pengambilan data.

Teknik kajian yang digunakan oleh penulis dalam pengambilan data yaitu teknik observasi partisipasi, teknik wawancara secara langsung dan tidak langsung serta teknik dokumentasi. Kemudian di analisis melalui tiga cara yaitu unitisasi data atau pengelompokan data, kategorisasi data dan penafsiran data. Penulis mendatangi langsung Pondok Pesantren Subulul Huda dan melaksanakan wawancara dengan pihak yang dijadikan sumber data primer yaitu Pengelola Pesantren, Bendahara Pesantren serta Majelis Pembimbing Organisasi di Pondok Pesantren Subulul Huda.

Data dikumpulkan dari latar alamiah yang merupakan sumber data langsung. Penulis berharap dapat menemukan makna dari setiap fenomena, sehingga memperoleh kearifan lokal dan nilai serta teori dari subjek yang dijadikan penelitian. Pemaknaan terhadap data tersebut, hanya dapat dilakukan oleh penulis ketika memperoleh kedalaman terhadap fenomena tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menemukan dan mendeskripsikan data secara menyeluruh dan utuh mengenai tata kelola pembiayaan pendidikan di pesantren modern. Ada beberapa pertimbangan penulis dalam menggunakan pendekatan ini antara lain: pertama, ingin

mengembangkan pemahaman terhadap data-data yang diperoleh di lapangan yang sesuai dengan apa adanya sehingga menghasilkan sebuah simpulan yang komprehensif. Kedua yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah aspek manajemen/pengelolaan, pembiayaan pendidikan.

Pada penelitian ini penulis akan menjelaskan fenomena atau karakteristik dan situasi lembaga atau kelompok tertentu secara akurat dan faktual. Adapun situasi lembaga dalam penelitian ini adalah Pesantren Subulul Huda, terutama karakteristik yang berkenaan dengan manajemen pembiayaan pendidikan di pesantren modern.

### **C. Hasil Dan Pembahasan**

Pesantren Subulul Huda merupakan lembaga pendidikan islam yang berdiri di bawah naungan Yayasan Subulul Huda. Yayasan Subulul Huda merupakan yayasan independen yang tidak terikat oleh pemerintah sehingga lembaga tersebut tidak mendapatkan anggaran dari pemerintah. Pembiayaan pendidikan dikelola oleh bendahara umum pesantren. Sumber pembiayaan pendidikan di Pesantren Subulul Huda yaitu iuran santri (SPP). Pesantren Subulul Huda tidak memiliki auditor khusus seperti inspektorat jendral kementerian agama yang memeriksa pengelolaan anggaran karena lembaga tersebut merupakan lembaga yang independen dan tidak berdiri di bawah naungan kementerian agama.

Jadi yang bertugas untuk mengaudit pengelolaan anggaran di Pesantren Subulul Huda yaitu sekretaris yayasan kemudian dilaporkan dan disetujui oleh pimpinan yayasan. Penganggaran di Pesantren Subulul Huda dibuat sesuai dengan kebutuhan pesantren. Setiap bagian baik pengelola madrasah atau pengurus organisasi santri membuat kebutuhan bagiannya satu bulan sekali. Pengurus organisasi melaporkan kebutuhan bagiannya kepada pembimbing organisasi kemudian pembimbing organisasi melaporkannya kembali kepada bendahara pesantren. Sedangkan pengelola madrasah langsung melaporkan kebutuhannya kepada bendahara pesantren untuk selanjutnya dibuat RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian Negara/Lembaga). Sistem monitoring dan evaluasi pembiayaan pendidikan di Pesantren Subulul Huda dilaksanakan dalam dua tahap yaitu perbulan dan pertahun. Setiap bagian yang menerima anggaran dari bendahara pesantren membuat laporan pertanggung jawaban bulanan yang berisi tentang inventarisasi serta menyerahkan nota/kwitansi pembelian barang. Laporan pertanggung jawaban tersebut kemudian diserahkan kepada pembimbing dan bendahara umum pesantren. Selanjutnya laporan pertanggung jawaban bulanan dihimpun dan dijadikan bahan evaluasi di akhir kepengurusan.

Pengeluaran dana harus disetujui oleh pimpinan pesantren, proses pengeluaran dana untuk setiap kegiatan perlu melampirkan proposal dengan rincian kegiatan serta besaran

anggaran yang diperlukan oleh kegiatan tersebut. Setelah pimpinan menerima, mensortir dan menyetujui proposal kegiatan, bendahara umum dapat langsung mencairkan dana untuk kegiatan tersebut.

Segala bentuk transaksi di Pesantren Subulul Huda dibuktikan dengan kwitansi sebagai bukti transaksi yang sah. Apabila transaksi tidak menggunakan kwitansi dikhawatirkan terjadinya penggelapan atau pemalsuan dana. Kwitansi tersebut juga berfungsi ketika pihak bendahara melakukan kelalaian dalam input data. Setiap laporan pertanggungjawaban perlu mencantumkan kwitansi sebagai bukti bahwa uang yang diberikan benar-benar dibelanjakan untuk hal yang diperlukan. Kwitansi juga digunakan ketika santri membayar uang SPP, baik santri atau bendahara keduanya sama-sama memiliki kwitansi tersebut apabila suatu saat terjadi kesalahan dalam memasukkan data pembayaran spp ke sistem. Apabila kwitansi yang dimiliki oleh santri tersebut hilang, pihak bendahara memiliki arsip/back up kwitansi tersebut di komputer. Pembelanjaan di minimarket tidak menggunakan kwitansi tetapi disertai dengan struk sebagai bukti pembelanjaan sedangkan pembelanjaan di pasar kebanyakan tidak memiliki kwitansi atau struk pembelanjaan.

Seluruh bagian yang ada dalam lingkungan pesantren, yang berkaitan dengan proses pengelolaan pembiayaan pendidikan perlu berperan serta. Hal ini dilakukan sebagai wujud asas keterbukaan, kebersamaan, serta pertanggungjawaban atas amanah kelembagaan yang harus dipikul bersama karena baik dan buruknya lembaga menjadi tanggungjawab bersama.

Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan upaya pengelolaan terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi serta dari mana sumber dana tersebut didapatkan. Ada beberapa hal yang tidak boleh dilupakan dan sipisahkan yaitu prinsip-prinsip pembiayaan pendidikan, maksudnya yaitu pembiayaan pendidikan tidak hanya harus dikelola secara efektif dan efisien tetapi harus juga memperhatikan beberapa prinsip berikut diantaranya yaitu kredibel (dapat dipercaya), responsible (bertanggung jawab), efisiensi, transparan dan akuntabilitas.

Tata kelola pembiayaan sebuah pesantren memerlukan adanya reorientasi manajemen pembiayaan di lingkungan pesantren dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan pembiayaan sebagai berikut:

1. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan
2. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program ataupun kegiatan

3. Terbuka dan transparan, dalam pengertian diri dan untuk apa keuangan lembaga tersebut perlu dicatat dan dipertanggungjawabkan disertai bukti penggunaannya
4. Sedapat mungkin menggunakan kemampuan atau hasil produksi dalam negeri.

Manajemen pembiayaan merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dilepaskan dalam sebuah manajemen lembaga pendidikan. Maka dari itu, manajemen pembiayaan pendidikan pada dasarnya merupakan bagian dari pembiayaan pendidikan yang tercermin dari anggaran yang telah ditetapkan oleh lembaga sehingga diperlukan penanganan yang serius agar dapat mencapai sebuah pengelolaan yang efektif dan efisien dalam pengelolaan anggaran serta program-program yang dibiayainya dalam mencapai tujuan pendidikan di sebuah lembaga. Oleh karenanya, sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal perlu mencari cara agar dapat mengelola anggaran pendidikan secara efektif dan efisien.

Dalam menggunakan anggaran, terdapat dasar yang lazim dijadikan pedoman yaitu azas umum pengeluaran negara, maksudnya manfaat penggunaan uang negara minimal harus sama apabila uang tersebut dipergunakan sendiri oleh masyarakat. Azas ini tercermin dalam prinsip-prinsip yang dianut dalam pelaksanaan APBN seperti prinsip efisiensi, pola hidup sederhana, hemat dan sebagainya.

Pengelolaan anggaran di Pondok Pesantren Subulul Huda dicatat dalam jurnal dan buku besar untuk pembuatan laporan keuangan bulanan/tahunan. Seluruh pemasukan dan pengeluaran dari bagian manapun dicatat dan segala macam bentuk pengeluaran harus disertai dengan nota/kwitansi sebagai bukti pembelanjaan. Kwitansi tersebut merupakan bukti yang menyatakan telah terjadinya penyerahan sejumlah uang dari pemberi kepada penerima dan ditandatangani oleh penerima yang ditulis pada kwitansi tersebut. Kwitansi dilengkapi dengan keterangan tempat, tanggal dan alasan penyerahan sejumlah uang tersebut. Untuk memperkuat tanda bukti transaksi pada kwitansi menggunakan materai sebesar angka yang telah ditentukan oleh undang-undang perpajakan.

Tidak semua transaksi pembelian memiliki kwitansi salah satu contohnya yaitu ketika melakukan pembelian barang di pasar, pihak pasar tidak memiliki kwitansi sebagai bukti pembelanjaan. Maka dari itu, kwitansi untuk pembelanjaan di pasar dibuat dengan tulisan tangan dan dibuktikan dengan tanda tangan penjual barang. Kwitansi yang ditulis tangan tersebut dianggap valid karena merupakan bukti transaksi antara penjual dengan pembeli.

Untuk mencegah terjadinya kehilangan kwitansi pembayaran spp santri, bendahara memiliki back up kwitansi yang sama. Hal tersebut bertujuan agar bukti tersebut tidak hilang begitu saja. Hal yang paling sering terjadi di pesantren ini yaitu kelalaian bendahara dalam



menginput data ke sistem pembayaran spp santri, maka dari itu dengan adanya back up kwitansi tersebut, kelalaian dari bendahara dapat diatasi dengan baik.<sup>31</sup>

Bantuan dana dari donatur sangat membantu terhadap kelancaran proses pendidikan. Hal ini berdasarkan hasil penelitian bahwa bantuan dana dari donatur amat sangat membantu terhadap proses pembiayaan pendidikan salah satunya kegiatan belajar mengajar, terutama bagi peserta didik yang kurang mampu namun berprestasi. Sebagaimana Martin mengemukakan bahwa sumber dana dari masyarakat dalam bentuk donatur sangat efektif untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pendidikan.

Pembiayaan pendidikan pada dasarnya bertitik pada upaya pendistribusian keuntungan pendidikan dan beban yang harus ditanggung oleh masyarakat. Secara sederhana biaya merupakan sejumlah nilai uang yang dibelanjakan atau jasa pelayanan yang diberikan pada peserta didik. Pembiayaan pendidikan berkaitan erat dengan distribusi beban pajak dalam berbagai jenis pajak kelompok manusia serta metode pengalihan pajak ke sekolah. Urgensi sebuah pembiayaan pendidikan merupakan berapa besar uang yang harus dibelanjakan, dari mana sumber uang yang diperoleh, dan kepada siapa uang harus dibelanjakan.

Fokus manajemen pembiayaan pendidikan yaitu bagaimana sumber dana yang ada dapat dikelola secara professional sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam proses pembelajaran. Manajemen pembiayaan pendidikan bertujuan untuk mengoptimalkan dana yang ada, mengalokasikan dana yang tersedia dan mendistribusikannya menjadi sarana dan prasarana yang menunjang terhadap pembelajaran sehingga dapat tercipta efektivitas serta efisiensi pembiayaan pendidikan.

Setiap lembaga perlu mengetahui seberapa banyak biaya yang dihabiskan untuk melakukan suatu upaya pelayanan jasa atau pencetakan produk tertentu atau biaya untuk mengembangkan sebuah jasa pendidikan. Dengan demikian, akan diketahui sirkulasi besaran anggaran yang dikeluarkan dan tidak sembarangan menggunakannya. Maka dari itu, diperlukan informasi manajemen biaya yang dibutuhkan, di antaranya adalah: (a) Manajemen strategik: untuk membuat keputusan-keputusan strategis yang tepat untuk pemulihan produk, metode proses, tehnik, dan saluran pemasaran serta hal-hal yang bersifat jangka panjang. (b) Perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mendukung keputusan yang sifatnya berkelanjutan kaitannya dengan pemindahan peralatan, pengelolaan aliran kas, pembelian bahan, dan penjadwalan. (c) Pengendalian manajemen dan operasional. (d) Penyusunan laporan keuangan.

## **1. PERENCANAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN**

Perencanaan merupakan proses perumusan tujuan yang akan dicapai sehingga pada akhirnya perlu dijadikan sebagai bekal di kemudian hari. Hasil dari sebuah perencanaan adalah rencana, yaitu dokumen yang memuat capaian dan strategi untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Secara umum perencanaan merupakan persiapan dalam melaksanakan sebuah pekerjaan untuk mencapai tujuan serta strategi agar dapat mencapainya. Persiapan dapat berupa aktivitas pengambilan keputusan di waktu yang akan datang. Maka dari itu, dalam membuat sebuah perencanaan harus berdasarkan metode serta analisis yang empiris, serta data yang cukup dan valid. Ada sebuah pepatah yang berkata bahwa *if you fail to plan, you plan to fail*.

Dalam penyusunan perencanaan pembiayaan pendidikan sebuah pesantren, perlu berdasar pada tiga hal, diantaranya yaitu: perencanaan pengembangan yayasan, perencanaan strategis (renstra) yayasan, dan program kerja pesantren. Ketiga komponen tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang perlu sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan RAPB (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja) sekolah/madrasah, sehingga proses pendidikan yang berkualitas dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

## **2. PENGANGGARAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN**

Anggaran selain berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian juga berfungsi sebagai alat bantu manajemen dalam mengarahkan suatu lembaga dalam mengarahkan lembaga menempatkan suatu organisasi dalam posisi yang kuat atau lemah. Anggaran dapat digunakan untuk melihat apakah program kegiatan berjalan dengan baik serta apakah penggunaan dana untuk pembiayaan tersebut sudah tepat, efektif serta efisien. Maka dari itu, anggaran memiliki peran dan fungsi yang sangat krusial dalam sebuah organisasi. Besaran anggaran juga dapat mencerminkan kekuatan suatu lembaga dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penganggaran (budgeting) merupakan aktivitas atau proses penyusunan anggaran. Penganggaran merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan aktivitas-aktivitas lembaga dalam kurun waktu tertentu. Lebih detail lagi, dalam menentukan biaya satuan pendidikan terdapat dua pendekatan yaitu makro dan mikro. Pelaksanaan anggaran sekolah harus dikontrol oleh kepala sekolah/madrasah sebagai manajer sekolah. Hal ini dilaksanakan agar supaya tidak ada penyelewengan atau penyimpangan dalam penggunaan anggaran sekolah, sehingga bisa mencapai tujuan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan harus dapat menjadi motifasi yang nerangsang untuk mencapai prestasi yang lebih baik, sehingga

pengawasan tersebut mampu menjelaskan sampai sejauh mana orang-orang akan diukur dan diberi suatu kesempatan untuk mengukur efektifitas yang mereka miliki. Pengawasan mampu sebagai media komunikasi yang mencakup konsep-konsep umum untuk membicarakan kemajuan organisasi.

Dalam penyusunan anggaran, sistematika yang tertuang dalam anggaran tersebut akan menggambarkan model penyusunan anggaran. Menurut George E. Ridler dan Robert J. Sclockley (1989) dalam bukunya *School Administrator Budget Handbook* terdapat lima model dalam mendesain atau menyusun anggaran diantaranya yaitu:

1. *Item based budget*
2. *Program budget system*
3. *Zero based budget*
4. *Incremental budget*
5. *Combination of system*

### **3. PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN**

Pelaksanaan adalah proses menggerakkan seluruh komponen struktur pengorganisasian supaya mereka mengimplementasikan segala sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya. Pelaksanaan akan membuat semua anggota organisasi untuk bekerja sama dan sama-sama bekerja. Dengan demikian *actuating* adalah keseluruhan proses mempengaruhi, mendorong, mengajak, maupun menuntun sumberdaya untuk kerjasama sesuai dengan pedoman guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pelaksanaan merupakan proses menggerakkan seluruh komponen struktur organisasi, supaya mereka mau mengimplementasikan tugas (*action movement*), yang telah direncanakan sebelumnya secara sungguh-sungguh.

Pembiayaan pendidikan pesantren bertujuan untuk membiayai seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan pendidikan di pesantren, demi pencapaian tujuan pendidikan, yaitu pendidikan bermutu. Artinya setiap anggaran yang diterima harus dipergunakan untuk kepentingan pesantren atas persetujuan ketua yayasan. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi ketua yayasan sebagai otorisator dan kepala madrasah sebagai ordonator. Dan yang harus diperhatikan dalam penggunaan pembiayaan pendidikan adalah berdasarkan pada kebutuhan yang telah dirumuskan sesuai dengan perencanaan pembiayaan pendidikan.

Penggunaan pembiayaan pendidikan pesantren dapat dikelompokkan ke dalam dua kegiatan yakni penerimaan dan pengeluaran pesantren. Segala bentuk penerimaan dan

pengeluaran dana tersebut, harus tercatat rapih dan detail. Selain itu juga, setiap pencatatan harus diperkuat dengan dokumen lain, seperti nota, kwitansi, faktur, dan lain sebagainya.

#### **4. PENGAWASAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN**

Pengawasan (controlling) adalah suatu kegiatan melihat, meperhatikan, memonitor, memeriksa, menilai dan melaporkan pelaksaannya suatu program kerja yang telah direncanakan dengan tujuan agar kegiatan- kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tertuang dalam perencanaan. Pengawasan yang dilakukan adalah kegiatan penilaian apakah manajemen keuangan pada sekolah sudah berjalan dengan baik atau belum. Pelaksanaan pengawasan dilakukan dalam upaya melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Proses pengawasan terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu: memantau (monitoring); menilai; dan melaporkan hasil-hasil temuan. Kegiatan atau monitoring dilakukan terhadap kinerja aktual (actual performance), baik dalam proses maupun hasilnya. Aktivitas yang sedang atau yang telah dilakukan terhadap kinerja aktual (actual performance), baik dalam proses maupun hasilnya.

Tujuan dari pengawasan (output-nya) adalah informasi yang tepat untuk bahan pelaporan kepada pihak yang berwenang melakukan pengambilan kebijakan berikutnya (rekomendasi). Untuk mencapai tujuan itu diperlukan suatu proses kegiatan yang dimulai dari monitoring, evaluasi, dan laporan. Pendapat lain mengemukakan bahwa tujuan pengawasan adalah menjamin ketercapaian tujuan pendidikan yang telah dan akan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dalam artian bahwa pengawasan pembiayaan pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur dan memberikan informasi akan kepastian terhadap ketepatan dari hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu, pengawasan terhadap penggunaan pembiayaan pendidikan merupakan aktivitas melihat, memerhatikan, memonitor, memeriksa, menilai, dan melaporkan terhadap penggunaan biaya pendidikan yang dialokasikan untuk membiayai program pendidikan, supaya sesuai dengan perencanaan secara efektif dan efisien.

Lembaga pengawas internal bertugas untuk melakukan pengawasan penggunaan dana pendidikan. Lembaga tersebut bertugas yaitu mengawasi dan mengaudit terhadap penggunaan atau pengeluaran seluruh dana yang ada di lingkungan yayasan, terutama di setiap jenjang pendidikan. Sehingga segala upaya terjadinya penyimpangan penggunaan dana pendidikan akan terawasi dengan seksama. Adapun tugas dan fungsi lembaga pengawas internal tersebut, adalah: 1) Menilai ketepatan pelaksanaan pengeluaran dana pendidikan; 2) Meyakinkan apakah pelaksanaan sesuai dengan kebijaksanaan, rencana dan prosedur yang ditetapkan; dan 3) Upaya pencegahan terhadap penyimpangan penggunaan dana pendidikan.

## **5. EVALUASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN**

Auditing merupakan proses pengumpulan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independent untuk dapat melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Dalam evaluasi pembiayaan pendidikan, pengawasan merupakan salah satu proses yang harus dilaksanakan. Kepala sekolah sebagai pimpinan perlu melakukan pengendalian pengeluaran anggaran keuangan sekolah yang selaras dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Monitoring adalah upaya pengumpulan informasi secara berkelanjutan yang ditujukan untuk memberikan informasi kepada pengelola program guna kepentingan tentang indikasi awal kemajuan dan kekurangan pelaksanaan program. Evaluasi adalah Kegiatan yang terjadwal untuk menilai secara objektif kinerja atau kesuksesan program yang sedang berjalan atau telah selesai, khususnya untuk menjawab pertanyaan tentang seberapa jauh kontribusi kegiatan program terhadap pencapaian hasil/ dampak yang telah ditetapkan.

Komponen utama yang akan dimonitor adalah: alokasi dana sekolah, penerima bantuan, penyaluran dan penggunaan dana, pelayanan dan penanganan pengaduan, dan administrasi keuangan. Pengawasan keuangan memiliki fungsi mengawasi perencanaan keuangan dan pelaksanaan penggunaan keuangan, sudah sesuai dengan juknis atau belum sehingga untuk melakukan pengawasan yang tepat, kepala sekolah diuntut untuk memahami pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksanaan administrasi keuangan, memahami peraturan pemerintah yang mengatur penggunaan dan pertanggung jawaban serta pengadministrasian keuangan.

Proses evaluasi ini dilaksanakan agar aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen pembiayaan pendidikan berjalan dengan lancar, efektif, efisien serta tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam prosesnya. Pengelolaan pendidikan perlu dilakukan dengan baik melalui langkah-langkah yang sistematis sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen. Hal ini berarti bahwa pembiayaan pendidikan sangat berpengaruh terhadap mutu pendidikan.

Pertanggung jawaban pembiayaan pendidikan harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya akuntabilitas hukum saja, melainkan akuntabilitas moral maupun politik. Terlebih auditor dalam melakukan tugasnya sangat berorientasi kepada audit kinerja. Dalam artian melakukan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan, harus akuntabel secara hukum, dan moral. Pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan merupakan bentuk sense of accountability

para pengelola keuangan pendidikan kepada atasannya. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga amanah yang diberikan kepada para pengelola keuangan pendidikan pesantren.

#### **D. Kesimpulan**

Tata kelola pembiayaan pendidikan di Pesantren Subulul Huda dicatat dalam jurnal dan buku besar untuk pembuatan laporan keuangan bulanan/tahunan. Seluruh pemasukan dan pengeluaran dari bagian manapun dicatat dan segala macam bentuk pengeluaran harus disertai dengan nota/kwitansi sebagai bukti pembelanjaan. Untuk tempat-tempat tertentu seperti pasar yang tidak memiliki bukti transaksi seperti kwitansi, dibuat kwitansi tulisan tangan dengan catatan mencantumkan tanda tangan penjual agar kwitansi tersebut dianggap valid. Selain bukti pembelanjaan, kwitansi juga diperlukan dalam pembayaran spp santri, santri dan bendahara memiliki kwitansi yang sama. Kwitansi asli diberikan kepada santri, kwitansi tersebut kemudian di copy dan disimpan oleh bendahara sebagai arsip untuk mencegah terjadinya kelalaian dalam input data pembayaran spp santri ke komputer. Sumber pembiayaan di Pesantren Subulul Huda berasal dari pemerintah, orangtua, dan donatur. Dengan sumber-sumber tersebut, pesantren sudah mempunyai kecukupan dana yang memadai untuk membiayai kegiatan pembelajaran secara berkelanjutan. Implementasi manajemen pembiayaan pendidikan di Pesantren Subulul Huda telah dilaksanakan secara efektif dan efisien serta konsisten dalam hal: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, dan evaluasi pembiayaan pendidikan.

#### **E. Referensi**

- Abdul Tolib. (2015). Pendidikan Di Pondok Pesantren Modern Terpadu.
- Ara Hidayat, A. S. (2019). Manajemen Sumber Dana dan Alokasi Pembiayaan pada Pesantren Mahasiswa. 3 (2), 120–133.
- Arifi, A. (2008). Anggaran Pendidikan dan Mutu Pendidikan (Respon Kebijakan Anggaran Pendidikan 20% dari APBN bagi Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah). Jurnal Pendidikan Agama Islam.
- Arifin, Z. (2012). Perkembangan Pesantren di Indonesia. Pendidikan Agama Islam.
- Azhari,U.L.,&Kurniady,D. A. (2016). Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas Pembelajaran dan Mutu Sekolah. Jurnal Administrasi Pendidikan.
- Badrudin. (2013). Dasar-dasar Manajemen. Bandung: Alfabeta. Badrudin. (2014). Manajemen Peserta Didik. Jakarta: PT. Indeks.
- Bahruni. (2018). Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Bendahara Pesantren. Bogor:

Pesantren Ummul Quro Al-Islami.

Ernie Widyastuti (2012), *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*, (Surakarta: Tesis).

Fattah, N. (2008). *Pembiayaan Pendidikan: Landasan Teori dan Studi Empiris*.

*Jurnal Pendidikan Dasar*.

Hamid, H. (2018). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Al-Khwarizmi: *Jurnal Pendidikan Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam*.

Harsono. (2007). *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.

Hidayat, A. (2012). *Pengelolaan Pendidikan (Konsep, Prinsip, dan Aplikasi dalam Mengelola sekolah dan Madrasah)*. In Universitas Pendidikan Indonesia.

Irawan. (2019). *Filsafat Manajemen Pendidikan Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Jahari, J., Khoiruddin, H., & Nurjanah, H. (2019). *Manajemen Peserta Didik*. *Jurnal Isema :Islamic Educational Management*.

Masditou. (2017). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan Yang Bermutu*. *Jurnal ANSIRU PAI*.

Masyhud, S. (2005). *Manajemen Pondok Pesantren*. Jakarta: Diva Pustaka. Menteri Pendidikan Nasional. (2009). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009*. Salinan.

Mulyasa, E. (2007). *Menjadi Kepala Sekolah yang Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Munir, A. (2013). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Islam*. *Jurnal At-Ta'dib*.

Mulkhan, A. M. (2013). *Filsafat Tarbiyah Berbasis Kecerdasan Makrifat*. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 219-239.

Nugroho, I. (2016). *Positivisme Auguste Comte: Analisa Epistemologis Dan Nilai Etisnya Terhadap Sains*. Cakrawala: *Jurnal Studi Islam*.

Nur Eka Setiowati, (2015) "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan Terpadu Nurushiddiiq Cirebon" (*Al-Amwal-Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*).

Nurhamzah, (2019) "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pesantren Berbasis Mutu: Penelitian di Pesantren Darut Tauhid Bandung dan Pesantren Modern Sahid Bogor (Disertasi Program Doktor UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Rindawati, S. (2017). *Responsibilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu*. *Sosiohumaniora*.

Sholihat, Saniyyah Siti, "Pengelolaan biaya pendidikan, partisipasi masyarakat dan mutu layanan pembelajaran madrasah ibtidaiyah swasta di Bandung". (Magister Program Studi

- Administrasi Pendidikan, Sekolah Pascasarjana, Bandung, 2017).
- Sanisah, S. (2015). Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB)*.
- Seran, A. (2014). Masa Depan Filsafat Dalam Era Positivisme Logis. *RESPONS*.
- Suharsaputra, U. (2013). *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Refika Aditama. UQI, P. (2020). *Data Bendahara Umum*. Bogor: PM UQI.
- Wahyuni, A. (2020). Instrumen Wawancara bersama Bendahara Pesantren Modern Ummul Quro Al-Islami. Bogor.
- Winda, C., Rizal, A. S., & Afriatin, T. S. (2018). Implementasi Manajemen Pendidikan Islam dalam Membina Kepribadian Islami di SMA Islam Terpadu Mifthul Khoir Dago Bandung. *TARBAWY : Indonesian Journal of Islamic Education*.